

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aminurddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang, Bengkayang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Florus, Paulus, 1994, *Kebudayaan Dayak; Aktualisasi dan Transformasi*, Institute Of Dayakology Research and Development, Pontianak.
- Frans L, S. Jacobus E. dan Cooncordius Kanyan, 1992, *Rumah Panjang Sebagai Pusat Budaya Pada Masyarakat Suku Bangsa Dayak Iban*, Institute Of Dayakology Research and Development, Pontianak.
- Hadi, Soetrisno, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbitan Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasanusimon, 2010, *Dilematika Hutan Rakyat di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Indriyanto, 2006, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antrapologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lotulung, Paulus E., 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nokus, Paulus, 2018, *Dayak Iban Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Penerbit Lembaga Literasi Dayak, Palangkaraya.
- Phang, Beny dan Valentinus, 2011, *Minum dari Sumber Sendiri, Dari Alam Menuju Tuhan*, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang.
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adatnya*, INSISTPress, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Singaribuan, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanintyo, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjito, 2017, *Kehutanan : Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supardi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Husaini Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1996 Nomor 58)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Aulia, Rifa, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Hak Ulayat dan Hutan Adat Di Mukim Beungga Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Sailan, Fakhriyasa Zalili, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Rongi di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Thedy, Since Iriani, "Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum Di Kota Manokwari (Studi Kasus Tanah Bandara Rendani)",

*Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Yunus, Ahsan, "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Skripsi*, Bagian Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.

#### **D. Internet**

Agri Aditya, "Kabupaten Bengkayang", <https://www.infokalbar.com>, diakses pada tanggal 23 September 2018.